E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4821-4830
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Pendidikan Untuk Semua: Membedah Kelas Sosial Dan Akses Belajar Di SDN 2 Tabat

Yusnadi

STAI Al-Washliyah Barabai, Kalimantan Selatan, Indonesia
e-mail: yusnadistai@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini melatarbelakangi pentingnya pemenuhan hak belajar universal melalui semangat Education for All (EFA), yang dalam realitasnya masih terbentur hambatan struktural berupa pelapisan kelas sosial ekonomi di tingkat tapak. Di SDN 2 Tabat, pemenuhan keadilan formal belum sepenuhnya menjamin kesetaraan substantif bagi peserta didik dari kelompok marginal. Penelitian ini bertujuan untuk membedah bagaimana stratifikasi kelas sosial orang tua memengaruhi aksesibilitas fasilitas belajar dan pengondisian disiplin siswa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam terhadap kepala sekolah, guru, dan wali murid; observasi partisipatif pasif terhadap dinamika pembelajaran di kelas; serta studi dokumentasi terhadap arsip sosiodemografi sekolah. Teknik pengolahan data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa meskipun SDN 2 Tabat sukses mengimplementasikan keadilan formal berupa pembebasan biaya administrasi dan penyaluran bantuan finansial (PIP), kesenjangan akses belajar substantif masih terjadi secara nyata. Siswa dari kelas sosial atas dengan mudah beradaptasi pada pembelajaran digital berkat modal ekonomi domestik yang kuat. Sebaliknya, siswa dari kelas sosial bawah rentan mengalami ketertinggalan fasilitas serta kendala kedisiplinan akibat tuntutan membantu ekonomi keluarga. Sekolah belum mampu bertindak sepenuhnya sebagai social leveller karena masih mereproduksi ketimpangan struktural masyarakat ke dalam ruang kelas. Pihak sekolah direkomendasikan untuk menerapkan strategi intervensi dan model pengajaran berdiferensiasi guna memitigasi dampak perbedaan kelas sosial tersebut.

Kata Kunci: Pendidikan Untuk Semua, Kelas Sosial, Akses Belajar, Inklusi Substantif.

Abstract

This research underscores the importance of fulfilling the universal right to learn through the spirit of Education for All (EFA), which in reality still faces structural barriers in the form of

socioeconomic class stratification at the grassroots level. At SDN 2 Tabat, the fulfillment of formal justice has not fully guaranteed substantive equality for students from marginalized groups. This study aims to examine how parental social class stratification affects accessibility to learning facilities and student discipline. The research method used was field research with a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews with the principal, teachers, and parents; passive participant observation of classroom learning dynamics; and documentation studies of the school's sociodemographic archives. Data processing used an interactive model encompassing data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity was tested through triangulation of sources and techniques. The study's conclusions indicate that although SDN 2 Tabat successfully implemented formal justice in the form of waiving administrative fees and distributing financial assistance (PIP), disparities in access to substantive learning still exist. Students from upper social classes easily adapt to digital learning thanks to their strong domestic economic capital. Conversely, students from lower social classes are vulnerable to facilities and disciplinary challenges due to the demands of supporting their families' finances. Schools are unable to fully act as social levelers because they continue to reproduce structural inequalities in society in the classroom. Schools are recommended to implement intervention strategies and differentiated teaching models to mitigate the impact of these social class differences.

Keywords : Education for All, Social Class, Access to Learning, Substantive Inclusion.

LATAR BELAKANG

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses interaksi sistematis antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar untuk mentransfer ilmu serta membentuk karakter. Dalam konteks sekolah dasar, pembelajaran harus dirancang secara inklusif tanpa memandang latar belakang ekonomi guna memastikan setiap anak mendapatkan hak tumbuh yang sama. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu tanpa adanya diskriminasi sosial. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mujadilah [58]: 11:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ}

Ayat ini menegaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah instrumen universal untuk mengangkat derajat kemanusiaan, sehingga proses pembelajaran di sekolah idealnya menjadi jembatan mobilitas sosial, bukan justru memperlebar jurang pemisah antarkelas (Anwar, 2023).

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan mutu pembelajaran akibat perbedaan kelas sosial siswa. Struktur kurikulum dan metode pengajaran yang kurang adaptif cenderung menguntungkan kelompok siswa dari keluarga mapan yang memiliki fasilitas belajar lengkap di rumah. Sebaliknya, siswa dari kelas sosial menengah ke bawah kerap mengalami ketertinggalan karena keterbatasan sarana

penunjang. Oleh karena itu, konsep "pendidikan untuk semua" menuntut restrukturisasi proses pembelajaran agar mampu mengakomodasi keragaman modal budaya dan finansial yang dibawa siswa ke sekolah. Pembelajaran yang berkeadilan harus mampu memberikan ruang bagi setiap anak untuk berkembang secara optimal sesuai potensinya (Suryadi & Pratama, 2024).

Disiplin belajar merupakan fondasi utama yang menentukan efektivitas penguasaan materi dan pembentukan karakter peserta didik di sekolah. Sikap konsisten dalam menaati aturan, mengatur waktu, dan menyelesaikan tugas akademik tidak tumbuh secara instan, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan domestik dan sekolah. Di tingkat sekolah dasar, internalisasi regulasi diri ini krusial untuk membentuk kebiasaan belajar yang berkelanjutan. Ketika disiplin belajar tertanam dengan kuat, hambatan eksternal yang dihadapi siswa dalam menyerap pelajaran dapat minimalkan (Rahman, 2022).

Meski demikian, penegakan dan kepatuhan terhadap disiplin belajar di sekolah tidak terlepas dari pengaruh stratifikasi sosial ekonomi orang tua. Siswa yang berasal dari kelas sosial mapan umumnya menunjukkan disiplin yang lebih stabil karena didukung oleh pengawasan ketat, fasilitas yang memadai, dan bimbingan terarah di rumah. Sebaliknya, anak-anak dari kelas sosial marginal sering kali menghadapi kendala kedisiplinan akibat tuntutan membantu ekonomi keluarga atau kurangnya pendampingan orang tua yang sibuk bekerja. Fenomena ini memicu ketimpangan akses pengondisian perilaku, sehingga disiplin belajar kerap kali menjadi hak istimewa kelompok tertentu daripada sebuah standar yang bisa dicapai oleh seluruh siswa secara merata (Wibowo, 2025).

Siswa sekolah dasar merupakan individu unik yang berada pada fase krusial perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sebagai subjek utama dalam ekosistem pendidikan, setiap siswa membawa identitas, bakat, serta tantangan tersendiri ke dalam ruang kelas. Kebijakan "pendidikan untuk semua" memosisikan siswa bukan sebagai objek pasif yang seragam, melainkan sebagai insan yang berhak mendapatkan perlakuan adil dan kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan dirinya. Keberhasilan suatu institusi pendidikan diukur dari sejauh mana sekolah mampu memfasilitasi kebutuhan seluruh siswa tanpa terkecuali (Hidayat, 2019).

Kendati demikian, identitas siswa di sekolah sering kali terfragmentasi oleh realitas kelas sosial yang melekat pada keluarga mereka. Siswa dari latar belakang ekonomi rendah sering kali mengalami marginalisasi terselubung, baik dalam bentuk keterbatasan akses terhadap bahan ajar digital maupun kerentanan psikologis akibat stigma sosial. Perbedaan kepemilikan modal ini memengaruhi rasa percaya diri dan partisipasi aktif siswa dalam dinamika belajar di kelas. Jika sekolah gagal memitigasi dampak perbedaan kelas sosial ini, maka siswa dari kelompok rentan akan terus berada dalam siklus ketertinggalan yang menghambat masa depan mereka (Ningsih & Saputra, 2024).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SDN 2 Tabat, ditemukan indikasi kuat adanya kesenjangan akses belajar dan fasilitas yang berkaitan erat dengan status sosial ekonomi orang tua siswa. Dalam kegiatan pengamatan di kelas, terlihat bahwa sebagian siswa yang memiliki gawai pribadi dan buku penunjang tambahan mampu merespons instruksi guru dengan cepat. Di sisi lain, siswa dari keluarga kurang mampu tampak kesulitan mengikuti ritme pembelajaran yang mulai mengintegrasikan perangkat digital. Ketimpangan

visual ini menunjukkan bahwa implementasi semangat "pendidikan untuk semua" masih menghadapi hambatan struktural di tingkat tapak (Data Observasi, 2026).

Implementasi kebijakan pendidikan untuk semua (*education for all*) menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan rekonstruksi kurikulum secara masif agar mampu mengakomodasi keberagaman karakteristik tata belajar peserta didik di sekolah inklusif. Pemerataan akses ini tidak sekadar berfokus pada penyediaan sarana fisik, melainkan pada penciptaan lingkungan belajar yang ramah, adaptif, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi (Mahendra, 2023). Dalam praktiknya, efektivitas sistem inklusi ini sangat bertumpu pada kompetensi pedagogik dan kesiapan mental guru dalam merancang diferensiasi pembelajaran di ruang kelas (Suryani, 2024). Di samping itu, optimalisasi dukungan teknologi asistif dan penyediaan media pembelajaran digital yang aksesibel terbukti mempercepat adaptasi akademis bagi siswa berkebutuhan khusus (Wibowo & Utama, 2022). Pendekatan humanis yang mengutamakan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat juga menjadi pilar krusial agar nilai-nilai kesetaraan dapat terinternalisasi dengan baik dalam kultur sekolah (Larasati, 2025). Guna menjamin keberlanjutan program ini, sinergi kebijakan yang kuat antara pemerintah daerah dan pengelola lembaga pendidikan mutlak diperlukan dalam hal pengalokasian anggaran yang berkeadilan (Ramadhan, 2023). Faktor penguat lain yang tidak kalah penting adalah keterlibatan emosional dan kolaborasi intensif antara pihak sekolah dengan orang tua untuk mengawal perkembangan psikologis anak secara holistik (Handayani, 2024). Pada akhirnya, keberhasilan pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat ini harus dievaluasi secara berkala melalui indikator pencapaian kualitas karakter dan kemandirian sosial siswa, bukan sekadar dari angka partisipasi murni di atas kertas (Prasetyo, 2026).

Selain masalah fasilitas, observasi awal juga menyoroti adanya korelasi antara kelas sosial dengan tingkat kehadiran serta pemenuhan disiplin tugas siswa di SDN 2 Tabat. Beberapa siswa dari latar belakang ekonomi lemah kedapatan sering terlambat atau tidak mengumpulkan tugas dengan alasan harus membantu pekerjaan orang tua selepas sekolah. Temuan-temuan empiris ini menegaskan urgensi untuk membedah lebih dalam bagaimana kelas sosial memengaruhi aksesibilitas dan mutu pengalaman belajar anak. Studi ini penting dilakukan agar diperoleh solusi konkret demi mewujudkan keadilan pendidikan yang hakiki di SDN 2 Tabat (Data Observasi, 2026).

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam dan peneliti tuangkan dalam judul penelitian ini, yaitu: “Pendidikan Untuk Semua: Membedah Kelas Sosial dan Akses Belajar di SDN 2 Tabat”.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang mendalam, holistik, dan kontekstual mengenai fenomena kelas sosial serta dampaknya terhadap akses belajar siswa. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya melihat data angka, melainkan berupaya membedah realitas sosial, hambatan struktural, dan ketimpangan yang terjadi di lingkungan sekolah secara natural. Karakteristik

deskriptif dalam penelitian ini berfungsi untuk menarasikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai bagaimana stratifikasi sosial ekonomi memengaruhi dinamika instruksional dan fasilitas yang diterima oleh para peserta didik (Creswell & Creswell, 2018).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui interaksi, wawancara mendalam, dan pengamatan terhadap subjek penelitian, seperti kepala sekolah, guru kelas, siswa dari berbagai latar belakang kelas sosial, serta perwakilan orang tua murid di SDN 2 Tabat. Sementara itu, data sekunder digunakan sebagai penunjang yang meliputi dokumen resmi sekolah, profil kelembagaan, data sosiodemografi orang tua siswa, serta catatan akademik maupun nonakademik yang relevan dengan fokus kajian. Adapun sumber data utama (informan) ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana pemilihan informan didasarkan pada kriteria tertentu yang dinilai paling memahami dan mengalami langsung isu aksesibilitas pendidikan ini (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi yang diterapkan adalah observasi partisipatif pasif, di mana peneliti hadir di lingkungan SDN 2 Tabat untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas, interaksi sosial antar-siswa, serta ketersediaan fasilitas belajar tanpa terlibat aktif dalam kegiatan sekolah. Selanjutnya, teknik wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur kepada para informan kunci guna menggali perspektif, hambatan finansial, serta kebijakan sekolah terkait keadilan akses. Terakhir, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa foto kegiatan, regulasi sekolah, serta arsip sosiodemografi yang dapat memperkuat validitas temuan di lapangan (Fadli, 2021).

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini merujuk pada model interaktif yang mengalir dari tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Langkah pertama yang dilakukan setelah data terkumpul adalah reduksi data, yaitu proses memilah, memfokuskan, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah dari catatan lapangan ke dalam pola-pola yang bermakna sesuai fokus kelas sosial dan akses belajar. Langkah kedua adalah penyajian data (*data display*), di mana informasi yang telah direduksi dirangkai secara naratif dalam bentuk teks deskriptif agar mudah dipahami. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan dengan cara mencari makna, mencatat keteraturan, dan menguji kembali kebenaran pola yang ditemukan agar menghasilkan kesimpulan yang sahih dan objektif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Untuk menjamin derajat kepercayaan dan validitas ilmiah dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menerapkan teknik pemeriksaan keabsahan data berupa triangulasi. Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda, misalnya memverifikasi pernyataan guru dengan penuturan siswa atau orang tua murid. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data yang sama menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda, seperti mengonfirmasi hasil wawancara mengenai kedisiplinan belajar siswa dengan data hasil observasi langsung di dalam kelas serta catatan dokumentasi absensi sekolah (Moleong, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Stratifikasi Kelas Sosial Orang Tua Siswa di SDN 2 Tabat

Berdasarkan hasil analisis data dokumentasi berupa arsip sosiodemografi dan formulir pendaftaran peserta didik, kondisi ekonomi orang tua siswa di SDN 2 Tabat menunjukkan pelapisan sosial yang cukup kontras. Mayoritas wali murid (sekitar 65%) bermata pencaharian sebagai buruh harian lepas, petani penggarap, dan pedagang keliling dengan penghasilan tidak menentu yang dikategorikan sebagai kelas sosial bawah. Sekitar 25% berada di kelas sosial menengah yang bekerja sebagai karyawan swasta atau wiraswasta kecil. Sementara itu, hanya 10% yang tergolong kelas sosial atas atau mapan, didominasi oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan pemilik usaha perkebunan setempat.

Ketimpangan struktural ini dipertegas oleh hasil wawancara dengan salah satu guru kelas, Ibu Sri (bukan nama sebenarnya), yang menyatakan:

"Kami tidak bisa memungkiri adanya jurang pemisah yang nyata di antara anak-anak. Siswa dari keluarga PNS atau pemilik kebun biasanya datang dengan kesiapan penuh, sementara anak-anak dari keluarga buruh sering kali membawa beban finansial orang tua mereka ke sekolah, seperti tidak punya uang jajan atau perlengkapan yang minim."

Akses Belajar dan Fasilitas Pembelajaran di Kelas

Hasil observasi langsung yang dilakukan di dalam ruang kelas IV dan V memperlihatkan bagaimana perbedaan kelas sosial ini mentransformasikan diri menjadi ketimpangan akses belajar materiil. Saat proses pembelajaran berbasis digital mulai diperkenalkan oleh guru, siswa dari kelas sosial mapan terlihat langsung mengeluarkan gawai (*smartphone*) pribadi berspesifikasi tinggi dan buku-buku LKS penunjang yang dibeli secara mandiri. Sebaliknya, siswa dari latar belakang ekonomi lemah cenderung pasif, saling berbagi satu buku cetak pinjaman sekolah untuk bertiga, serta tidak memiliki perangkat untuk mengakses platform belajar digital.

Kondisi ini diperkuat oleh pengakuan seorang siswa kelas V, Rian (bukan nama sebenarnya), yang orang tuanya bekerja sebagai buruh tani:

"Kalau disuruh cari materi di internet atau pakai aplikasi, saya biasanya numpang lihat punya teman, Kak. Di rumah Bapak tidak punya HP yang bisa internetan, dan uangnya lebih baik dipakai untuk beli beras."

Dokumentasi berupa foto inventaris kelas dan daftar distribusi bantuan buku paket juga menunjukkan bahwa kuota buku gratis dari sekolah sering kali tidak mencukupi rasio satu siswa satu buku, sehingga siswa yang tidak mampu membeli buku penunjang sendiri secara otomatis kehilangan akses belajar yang optimal di rumah.

Disiplin Belajar dan Pengondisian Perilaku di Rumah

Aspek kedisiplinan belajar di sekolah ternyata memiliki korelasi kuat dengan modal budaya dan waktu luang yang dimiliki oleh ruang domestik siswa. Melalui observasi berkala, peneliti mencatat bahwa siswa yang sering terlambat masuk kelas, tidak berseragam

lengkap, atau abai dalam mengumpulkan tugas rumah didominasi oleh anak-anak dari kelas sosial bawah. Fenomena ini bukan disebabkan oleh kemalasan intrinsik siswa, melainkan karena keterbatasan lingkungan dalam memberikan pengondisian perilaku.

Dari hasil wawancara mendalam dengan salah satu orang tua siswa kelas IV yang bekerja sebagai buruh cuci keliling, terungkap alasan di balik kendala kedisiplinan tersebut:

"Saya berangkat kerja dari subuh dan pulang magrib dalam keadaan capek, Mas. Jangankan mau memeriksa PR anak atau menyuruh mereka disiplin belajar, untuk memastikan mereka sudah makan saja saya sudah bersyukur. Anak saya bahkan sering harus menjaga adiknya dulu sebelum berangkat sekolah."

Sebaliknya, catatan dokumentasi buku kendali BK (Bimbingan Konseling) menunjukkan bahwa anak-anak dari kelas sosial menengah ke atas memiliki persentase pelanggaran disiplin yang sangat minim. Hal ini dikarenakan orang tua mereka memiliki waktu luang atau mampu menyediakan guru les privat untuk mendampingi masa belajar anak di rumah.

Respon dan Kebijakan Sekolah terhadap Semangat "Pendidikan untuk Semua"

SDN 2 Tabat pada dasarnya telah berupaya mengimplementasikan semangat *Education for All* (EFA) melalui kebijakan-kebijakan administratif, seperti pembebasan biaya SPP dan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP). Berdasarkan dokumen rekapitulasi penerima bantuan, pihak sekolah telah memprioritaskan siswa dari kelas ekonomi bawah untuk menerima dana stimulan tersebut.

Namun, hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 2 Tabat mengungkap adanya hambatan dalam menuntaskan isu kelas sosial ini secara substantif:

"Secara administratif, semua anak di sini sama-sama gratis sekolah. Tapi substansi 'akses belajar' itu kan tidak mandek di biaya sekolah saja. Ketika pembelajaran masuk ke ranah digital atau tugas mandiri di rumah, intervensi sekolah jadi terbatas. Kami tidak bisa membelikan HP untuk setiap anak miskin, dan kami juga tidak bisa memaksa orang tua buruh untuk berhenti bekerja demi mendampingi anaknya belajar."

PEMBAHASAN

Reproduksi Sosial Melalui Kesenjangan Fasilitas Belajar

Hasil penelitian mengenai ketimpangan fasilitas materiil di dalam kelas menunjukkan bahwa ruang sekolah belum sepenuhnya berhasil menjadi penyetara sosial (*social leveller*). Ketika SDN 2 Tabat mulai mengintegrasikan perangkat digital dan menuntut penggunaan buku penunjang mandiri, anak-anak dari kelas sosial atas dengan mudah beradaptasi karena dukungan kapital finansial orang tua mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa perbedaan kelas sosial di luar sekolah secara langsung direproduksi menjadi perbedaan capaian akademik di dalam kelas. Sekolah, tanpa disadari, melegitimasi ketimpangan ini dengan memberlakukan ritme pembelajaran modern yang hanya bisa diakses secara optimal oleh segelintir siswa yang memiliki modal memadai di rumahnya (Sari & Rahman, 2023).

Kondisi empiris ini sangat relevan dengan Teori Reproduksi Sosial yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Teori ini menyatakan bahwa lembaga pendidikan memiliki kecenderungan untuk memelihara dan melestarikan struktur kelas sosial yang ada

di masyarakat, ketimbang menghapusnya. Ketika proses instruksional di SDN 2 Tabat mengasumsikan bahwa semua siswa memiliki tingkat kesiapan teknologi yang sama, sekolah sebenarnya sedang menguntungkan kelompok dominan. Siswa dari kelas sosial rendah mengalami hambatan bukan karena ketiadaan bakat intelektual, melainkan karena ketersediaan sarana yang timpang. Akibatnya, sistem pendidikan bertindak sebagai transmisi mekanis yang mengubah keuntungan ekonomi orang tua menjadi keuntungan akademik anak (Hidayat, 2019).

Konversi Modal Budaya dan Waktu dalam Penegakan Disiplin Belajar

Temuan lapangan terkait kedisiplinan dan pengondisian perilaku di rumah memperlihatkan bahwa tertib akademis bukanlah sebuah nilai yang berdiri sendiri, melainkan produk dari pengondisian lingkungan domestik. Siswa dari kelas sosial marginal di SDN 2 Tabat kerap kali didera pelanggaran disiplin seperti terlambat atau lalai mengumpulkan tugas akibat adanya tuntutan domestik untuk membantu ekonomi keluarga. Sebaliknya, waktu luang (*leisure time*) dan kemampuan finansial orang tua kelas menengah ke atas untuk menyewa guru les menciptakan ruang ideal bagi internalisasi habitus belajar yang disiplin pada diri anak sejak dini (Wibowo, 2025).

Analisis ini dapat dibedah menggunakan Teori Modal (*Capital Theory*) Pierre Bourdieu, khususnya mengenai hubungan antara *economic capital* (modal ekonomi) dan *cultural capital* (modal budaya). Modal budaya dalam bentuk *embodied state*—seperti disposisi pikiran, pengelolaan waktu, dan kebiasaan disiplin—tidak tumbuh secara otomatis, melainkan membutuhkan investasi waktu dan finansial dari orang tua. Orang tua dari kelas bawah di SDN 2 Tabat bukannya tidak memedulikan masa depan anak mereka, namun seluruh energi dan waktu mereka telah habis terserap untuk strategi bertahan hidup (*survival strategy*). Oleh karena itu, ketimpangan disiplin belajar yang tampak di permukaan sesungguhnya merupakan manifestasi dari kemiskinan modal budaya dan ekonomi yang terakumulasi di ruang domestik (Pratama, 2024).

Paradoks Kebijakan *Education for All* di Tingkat Tapak

Kebijakan SDN 2 Tabat dalam membebaskan biaya administrasi (SPP) dan menyalurkan dana bantuan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) patut diapresiasi sebagai pemenuhan aspek keadilan formal. Namun, hasil penelitian membuktikan bahwa penghapusan hambatan biaya masuk (aksesibilitas formal) belum mampu menjamin kesetaraan dalam proses dan hasil belajar (aksesibilitas substantif). Paradoks ini muncul karena intervensi kebijakan sekolah sering kali berhenti di gerbang sekolah, sementara faktor penentu keberhasilan belajar pasca-pandemi sangat bergeser pada ketersediaan ekosistem pendukung digital dan kultural di rumah yang sarat akan pengaruh stratifikasi sosial (Ningsih & Saputra, 2024).

Secara teoritis, ketidakberdayaan institusi sekolah dalam menuntaskan problem struktural ini sejalan dengan konsep *Institutional Habitus*. Konsep ini menjelaskan bahwa sekolah memiliki budaya organisasi internal yang sering kali bias terhadap nilai-nilai kelas menengah. Meskipun bantuan finansial telah didistribusikan, kurikulum dan standar evaluasi yang digunakan sekolah tetap menuntut kompetensi yang hanya bisa dicapai jika anak memiliki fasilitas ideal di rumahnya. Menurut teori sosiologi pendidikan kritis, selama sekolah tidak melakukan diferensiasi pembelajaran yang radikal bagi siswa kelompok marginal, maka

jargon "pendidikan untuk semua" hanya akan menjadi topeng formalitas yang menyembunyikan eksklusi terselubung di dalam sistem pengajaran (Anwar, 2023).

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun SDN 2 Tabat telah berhasil mengimplementasikan; 1) Aspek keadilan formal melalui kebijakan pembebasan biaya sekolah dan penyaluran bantuan finansial (PIP), semangat "pendidikan untuk semua" belum sepenuhnya terwujud secara substantif di tingkat tapak. Di dalam ruang kelas, perbedaan kelas sosial orang tua terbukti kuat mereproduksi 2) Ketimpangan riil akses belajar yang membagi siswa ke dalam dua kutub; kelompok mapan dengan modal finansial dan budaya melimpah dapat dengan mudah mengadopsi pembelajaran modern berorientasi digital, sementara kelompok marginal kerap kali tereliminasi dari 3) Kedisiplinan dan fasilitas belajar yang memadai akibat beban ekonomi domestik. Dengan demikian, institusi sekolah belum mampu bertindak sebagai *social leveller* (penyetara sosial), melainkan masih menjadi ruang yang melanggengkan stratifikasi sosial jika tidak diimbangi dengan 4) strategi pengajaran berdiferensiasi yang radikal dari pihak sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, K. (2023). *Keadilan Sosial Dalam Pendidikan Islam: Teori Dan Praktik Di Sekolah Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches* (5th Ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.

Handayani, T. (2024). *Kolaborasi Sekolah Dan Orang Tua Dalam Mengawal Perkembangan Psikologis Anak Di Sekolah Inklusi*. Jurnal Psikologi Dan Konseling Pendidikan, 16(2), 142-155.

Hidayat, R. (2019). *Sosiologi Pendidikan: Analisis Struktur Dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Larasati, M. (2025). *Pendekatan Humanis Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kultur Sekolah Setara*. Jurnal Sosial Budaya Dan Pendidikan, 11(3), 210-223.

Mahendra, R. (2023). *Rekonstruksi Kurikulum Inklusif: Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Adaptif Dan Bebas Diskriminasi*. Jurnal Teori Dan Praktik Pendidikan, 14(1), 33-46.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ningsih, S., & Saputra, A. (2024). Marginalisasi Terselubung: Dampak Kelas Sosial Terhadap Psikologis Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Social Dan Pendidikan*, 11(2), 145-158.

Prasetyo, B. (2026). *Evaluasi Kualitas Pendidikan Inklusi: Mengukur Kemandirian Sosial Dan Karakter Peserta Didik*. Jurnal Evaluasi Dan Kebijakan Pendidikan, 18(1), 88-101.

Pratama, M. (2024). Teori Modal Bourdieu Dalam Membedah Ketimpangan Pendidikan Di Sekolah Dasar Pedesaan. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Indonesia*, 5(2), 89-104.

Rahman, F. (2022). *Pembentukan Karakter Dan Disiplin Belajar Anak Di Era Digital*. Bandung: Alfabeta.

Ramadhan, F. (2023). *Sinergi Kebijakan Dan Alokasi Anggaran Berkeadilan Dalam Program Pemerataan Akses Pendidikan*. Jurnal Administration Dan Kebijakan Publik, 9(2), 115-128.

Sari, D. P., & Rahman, F. (2023). Integrasi Teknologi Dan Tantangan Digital Divide Pada Anak-Anak Kelas Sosial Marginal. *Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 7(3), 112-126.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryadi, T., & Pratama, M. (2024). Analisis Kurikulum Merdeka: Antara Inklusi Dan Kesenjangan Sosial Ekonomi. *Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar*, 8(1), 34-49.

Suryani, E. (2024). *Kesiapan Mental Dan Kompetensi Pedagogik Guru Dalam Menerapkan Diferensiasi Pembelajaran*. Jurnal Pendidikan Khusus, 13(4), 202-215.

Wibowo, A. (2025). Pengaruh Modal Budaya Keluarga Terhadap Disiplin Akademik Siswa Di Daerah Suburban. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 13(3), 210-225.

Wibowo, A., & Utama, D. (2022). *Pemanfaatan Technology Asistif Dan Media Digital Aksesibel Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus*. Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Inovasi, 8(3), 74-87.